IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PARTAI GOLKAR (STUDI KASUS TERPILIHNYA BUPATI DAIRI MENJADI KETUA GOLKAR KABUPATEN DAIRI)

Elysabeth Sigalingging[1)], I Ketut Putra Erawan[2)], Kadek Dwita Apriani[3)]

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Email: elysabethsigalingging28@gmail.com[1)], ketut.erawan@ipd.or.id[2)], kadek.dwita88@unud.ac.id[3)]

ABSTRACT

The focus of this study aims to find out how the implementation of the Golkar Party's policies related to the election of the Dairi Regent to become the Golkar Chair of Dairi Regency in the IXth Regional Deliberation Session in 2020. Furthermore, this research is framed using the Rational Choice Theory from James S. Coleman to look at the preferences of actors to support individuals or groups with various goals. The research method used is a descriptive qualitative research method using primary data and secondary data, because in this study trying to describe the rationality factors that could lead to Airlangga Hartarto's support for Eddy Keleng Ate Berutu in the IXth Regional Deliberation Session of the Golkar Party of Dairi Regency in 2020. The result of this research is the existence of a discretionary policy letter from Airlangga Hartarto to Eddy Keleng Ate Berutu to achieve the desired goal in the election of the Chairman of the DPD II Golkar Party Dairi.

Keywords : Discretionary Policy, Chairman of Golkar Dairi and Rational Choice.

1. PENDAHULUAN

Partai Politik ialah instrumen yang tidak terlepaskan dari sistem kerakyatan di negara dan juga di dunia. Tidak bisa disebut demokratis suatu negara bila tidak terdapat partai politik dalam negara itu sebab hakikatnya partai politik ialah perwujudan dari independensi warga guna membuat kelompok selaras terhadap kepentingannya. Fungsi utama dari partai politik adalah mencari kekuasaan, mendapatkan kekuasaan dan mempertahankannya. (Zerina Definta Bustari, 2003). Kemunculan partai politik di Indonesia dikatakan merupakan periode pertama lahirnya partai politik di Indonesia yaitu pada masa penjajahan Hindia Belanda. Sebenarnya kemunculan partai politik Indonesia sudah ada sebelum kemerdekaan Indonesia.

Awal mulanya terbentuknya partai politik d Partai politik yang paling pertama dibentuk di Indonesia adalah De Indische Partij pada tanggal 25 Desember 1912 oleh Douwes Dekker, Ki Hajar Dewantara, dan Tjipto Mangunkoesoemo. (A.S.Ma'arif, 1993) Lahirnya partai politik ini menandai adanya kesadaran nasional di Indonesia.i Indonesia adalah lahirnya Budi Utomo yang merupakan perkumpulan kaum terpelajar. Partai Golkar merupakan partai yang besar dan memiliki sejarah panjang dalam perpolitikan Indonesia. Partai Golkar merupakan partai penguasa orde baru, karena ditopang oleh kekuasaan birokrasi

dan militer. Awalnya Golkar bernama Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar) yang dibentuk secara resmi pada tanggal 20 Oktober 1964. Untuk pertama kalinya berpartisipasi dalam pemilihan nasional pada tahun 1971 sebagai Golongan Karya (Golkar).

Partai Golkar menjadi partai yang berkembang pesat hingga ke pelosok kabupaten, salah satunya adalah Kabupaten Dairi. Partai Golkar masih menjadi partai yang besar di dunia perpolitikan Kabupaten Dairi, meskipun ada berbagai ancaman dari luar maupun dari dalam partai itu sendiri turut menyertai perjalanannya. Pada sidang Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar Kabupaten Dairi yang ke-IX tahun 2020, Bupati Dairi Dr.Eddy Keleng Ate Berutu lalu terpilih dnegan aklamasi selaku Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Dairi masa bakti 2020-2025. Eddy Keleng Ate Berutu mendaftarkan diri dan menang menjadi Ketua Partai Golkar Kabupaten Dairi atas dasar surat rekomendasi diskresi dari Airlangga Hartarto selaku Ketua Umum DPP Partai Golkar.

Kebijakan Ketua Umum DPP Partai Golkar yang menerbitkan diskresi kepada Eddy Keleng Ate Berutu (EKAB) menjadi modal utama beliau maju dalam pemilihan Ketua Golkar Kabupaten Dairi, walau tidak memenuhi syarat sebagai anggota aktif partai paling tidak lima tahun serta tidak pernah jadi anggota parpol lainnya. Latar belakang Eddy Keleng Ate Berutu yang bukan berasal dari Partai Golkar ataupun bukan kader Partai Golkar memunculkan pertanyaan bagi masyarakat Kabupaten Dairi.

Terpilihkannya Bupati Dairi dalam Musda Partai Golkar Kabupaten Dairi yang ke-IX tahun 2020 dengan aklamasi sesudah dua calon Ketua yang sebelumnya turut mendaftarkan di bursa Calon Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Dairi yakni Sabam Sibarani dan Delphy Masdiana Ujung secara resmi mengundurkan diri. (Kurniawan, 2010)

Alasan dinaikkannya Dr.Eddy Keleng Ate Berutu menjadi Ketua Partai Golkar Kabupaten Dairi karena adanya posisi yaitu sebagai Bupati Dairi. (Eko Prasetya, 2020) Sejauh ini yang terlihat memang posisi yang menjadi alasan dinaikkannya Dr.Eddy Keleng Ate Berutu, karena massa dan uang tidak ada ataupun tidak terlihat. Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto memiliki pertimbangan, walaupun tidak diketahui apa yang menjadi pertimbangan itu.

2. KAJIAN PUSTAKA

Pada penelitian “Implementasi Kebijakan Partai Golkar (Studi Kasus Terpilihnya Bupati Dairi Menjadi Ketua Partai Golkar Kabupaten Dairi)” ini, peneliti memerlukan beberapa kajian riset terdahulu yang serupa dan berkaitan terhadap topik permasalahan penelitian ini. Di bawah beberapa riset terdahulu yang menjadi bahan perbandingan dengan penelitian ini.

Pertama, penelitian berjudul ”Peran Dan Wewenang Majelis Tuha Peut Dalam Membuat Kebijakan Partai Aceh (Studi Kasus Dewan Pimpinan Partai Aceh)

dilakukan oleh M. Alfi Syahri (2018)". Permasalahan pada penelitian ini yaitu Tuha Peut hanya menyisahkan satu orang Ketua Tuha Peut, yang mana dua anggota lain menentukan agar keluar dari PA dan Ketua Partai mengungkapkan yakni fungsi Tuha Peut hanya untuk pesijeuk (acara ceremonial atau ritual agama) saja, bertolak belakang dengan fugsi Tuha Peut yang termaktub pada AD/ART PA.

Kedua, buku ini berjudul " Diskresi Birokrasi" dilakukan oleh Sri Juni Woro Astuti (2009). Buku ini berisi mengenai diskresi birokrasi sangatlah harus dilaksanakan karena keterhubungannya terhadap usaha meningkatkan efektivitas penerapan kebijakan serta layanan masyarakat, merupakan suatu isu sentral pada pengkajian administrasi negara. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sri Juni Woro Astuti dinyatakan bahwa diskresi terkait in dimaknai merupakan keterampilan administrator agar menentukan dari antara alternatif serta menentukan bagaimanakah kebijakan pemerintahan wajib diterapkan pada suatu keadaan.

Ketiga, buku ini berjudul "Keputusan Diskresi dalam Dinamika Pemerintahan (Aplikasi dalam PTUN) ditulis oleh Eri Yulikhsan, S.H., M.H. Buku ini membahas tentang bagaimana diskresi dapat dilakukan, siapa yang dapat menerbitkan keputusan diskresi serta batasan yang harus diperhatikan dalam penggunaan diskresi yang sudah cukup banyak dilakukan, akan tetapi bagaimana suatu keputusan diskresi tersebut dilaksanakan oleh Badan /Pejabat Administrasi Pemerintahan bahkan lebih jauh bagaimana keputusan diskresi diuji keabsahan dan legalitasnya oleh Pengadilan Tata Usaha Negara yang masih jarang ditemukan. Bahkan dikalangan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara sendiri, masih jarang memikirkan apakah suatu keputusan yang diujinya adalah keputusan diskresi atau bukan.

Mengkaji permasalahan yang tepat pada penelitian ini, penulis menggunakan Teori Pilihan Rasional (*Rasional Choice Theory*) yang dicetuskan oleh James S.Coleman. Menurut Coleman (dalam Bagong, dkk, 2018: 88), orientasi dalam pilihan rasional dapat dilihat dari ide dasar, bahwa orang bertindak dan melakukan suatu hal dengan maksud untuk mencapai tujuan, dimana tujuan (dan oleh karenanya tindakan-tindakan) dibentuk oleh berbagai nilai atau preferensi. Terdapat dua komponen yang terkandung dalam teori pilihan rasional yaitu aktor dan sumber daya. Menurut Coleman, sistem tindakan sosial memiliki dasar yaitu terdapat setidaknya dua pelaku yang saling memiliki kepentingan yang dikontrol satu sama lain. Oleh karena adanya kepentingan tersebut akan mendorong kedua pelaku untuk melakukan sesuatu tindakan dimana satu sama lain akan ada keterikatan dan hubungan.

Penelitian ini mengikuti cara berpikir dari James S. Coleman dalam melihat pilihan rasional yang dimiliki oleh seorang aktor. Berdasarkan fokus penelitian ini mengkaji tindakan dari aktor Partai Golkar khususnya Ketua Umum DPP Partai Golkar. Ketua Umum DPP Partai

Golkar menjadi tokoh yang sangat dihormati dan memiliki kekuasaan tertinggi yang tidak dimiliki semua orang. Salah satu contoh keputusannya adalah mengeluarkan surat kebijakan diskresi. Inilah yang disebut dengan memiliki kekuasaan tertinggi, beliau mampu mengeluarkan kebijakan apapun tanpa adanya larangan dari pihak lainnya. Menurut pemahaman peneliti Teori Pilihan Rasional dimana perilaku sosial disebabkan perilaku individu dalam membuat keputusannya dan teori ini fokus pada penentu pilihan individu. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa Ketua Umum DPP Partai Golkar mengeluarkan kebijakan sendiri. Pemberian diskresi merupakan sebuah hak yang hanya dimiliki oleh pemimpin Partai Golkar yaitu Airlangga Hartarto sendiri.

3. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif karena metode ini merupakan metode yang paling tepat untuk mengumpulkan data mengenai permasalahan yang dibahas pada fenomena sosial politik. Hal ini yang menguatkan metode penelitian ini digunakan dalam fenomena ini adalah memungkinkan peneliti untuk mengetahui lebih dalam lagi mengenai permasalahan yang dibahas. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data deskriptif dengan melakukan pendekatan kualitatif. Menurut Bodgan dan Taylor, metodologi kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (dalam Moleong,2015). Peneliti ingin mengamati serta memberikan gambaran deskripsi mengenai implementasi kebijakan Partai Golkar terkait terpilihnya Bupati Dairi menjadi ketua Golkar Kabupaten Dairi dengan melihat kenyataan ataupun fenomena yang ada pada masyarakat. Fenomena yang terjadi pada subjek penelitian digambarkan dalam bentuk naratif dan tekstual. Sumber data merupakan salah satu unsur yang sangat perlu dipersiapkan sebelum melakukan penelitian. Peneliti dapat menentukan pilihan sumber data utama dan sumber data tambahan.

Jenis informan yang ditetapkan peneliti sebagai sumber informasi adalah informan kunci, informan utama, dan informan tambahan. Informan kunci yang dimaksud adalah Ketua Golkar terpilih Eddy Keleng Ate Berutu dan calon ketua golkar yang mengundurkan diri karena informan ini dinilai mampu berbagi informasi pengetahuan serta konsep dengan peneliti. Calon ketua Golkar yang mengundurkan diri, yang akan dijadikan sebagai informan kunci terdiri dua informan yaitu Delphy Masdiana Ujung dan Sabam Sibarani. Selanjutnya informan utama, peneliti memilih satu informan dari Ketua Fraksi dan Wakil Ketua Pemenangan Pemilu.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Penelitian

Provinsi Sumatera Utara memiliki 25

Kabupaten dengan luas wilayah sebesar 72.981,23 km2. Salah satu kabupatennya adalah Kabupaten Dairi yang ibukotanya Kecamatan Sidikalang. Terhitung sejak tanggal 1 Oktober 1947 dan pada tanggal 1 Oktober 1947 adalah sebagai hari bersejarah Kabupaten Dairi. Letak Astronomis Kabupaten Dairi berada pada 98 00' – 98 30' BT dan 2 15' 00"-3 00'00" LU. Luasan daerah Kabupaten Dairi 192.780 ha ataupun kisaran 2,69% dari luasan Provinsi Sumatera Utara (71.680,68 km2) dengan ibukota Kabupaten yakni Sidikalang, mencakup 15 kecamatan, 169 desa/kelurahan. Kabupaten Dairi yaitu daerah dengan iklim tropis yang mempunyai dua musim yakni musim kemarau serta musim hujan.

Tertera bahwa yang menjabat sebagai pemimpin Kabupaten Dairi adalah seorang Bupati yang Bernama Dr.Ir. Eddy Keleng Ate Berutu, M.A dan Wakilnya yang bernama Jimmy Andrea Lukita Sihombing, S.H. Terdapat beberapa kelompok partai di Kabupaten Dairi, salah satunya adalah Partai Golkar. Ketua memiliki peranan yang sangat penting bagi organisasi khususnya pada Partai Golkar di Kabupaten Dairi. Dalam konsep ini Ketua Partai Golkar memiliki tugas sebagai penggerak memajukan Partai Golkar, mensejahterakan kader-kader Partai Golkar yang ada, dan memenangkan segala event seperti Pilkada dan Pilpres. Adapun keanggotaan pada Partai Golkar di Kabupaten Dairi bukan atas dasar ideologi masing-masing anggota, melainkan digolongkan berdasarkan fungsi serta lebih memperhatikan keanggotaan bagian partai tersebut.

4.2 Perkembangan Partai Golkar di Kabupaten Dairi

Partai Golkar sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat Dairi karena banyak yang melihat langsung dan meyakini bagaimana pembangunan daerah yang dikerjakan oleh Partai Golkar. Alasan inilah yang kemudian memunculkan mayoritas masyarakat secara loyal memilih Partai Golkar dalam setiap pemilihan umum. Eksistensi Partai Golkar di Kabupaten Dairi dapat dikatakan sangat baik, dan popularitasnya pun sangat terpelihara. Ini dipengaruhi oleh dukungan yang besar oleh tokoh masyarakat ataupun tokoh adat setempat, tokoh masyarakat ini dianggap memiliki kedekatan dengan kekuasaan ataupun pemerintah. Partai Golkar dianggap sangat sukses dan memegang tonggak kekuasaan Kabupaten Dairi, ini dikarenakan semua bupati terpilih semenjak tahun 1964 hingga 2014 berasal dari Partai Golkar. Partai Golkar ditunjuk sebagai Pemenang Pemilihan Legislatif tahun 2019, Partai Golkar menang dengan memperoleh 9 kursi yang diikuti PDI Perjuangan dan Demokrat yang masing-masing hanya menempati 5 kursi. Setiap periodenya Partai Golkar selalu memenangkan kursi terbanyak dari Pemilu ke Pemilu dibandingkan dengan partai politik lainnya yang ada di Kabupaten Dairi. Partai Golkar selalu menjadi pemegang pimpinan, bahkan Ketua DPRD Tahun

2019-2024 berasal dari Partai Golkar yaitu Sabam Sibarani.

Setiap partai politik di masing-masing daerah memiliki kebijakan yang berbeda-beda. Salah satu partai yang memiliki kebijakan dalam partainya adalah Partai Golkar. Berdasarkan AD/ART Partai Golkar, Musyawarah Daerah atau Musda merupakan agenda penting bagi pemegang kekuasaan. Syarat pertama merupakan syarat yang tertuang pada AD/ART Partai Golkar (terdapat pada pasal 18).

1) Syarat-syarat menjadi Pengurus Partai :
   a. Ada keaktifan jadi anggota sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;
   b. Memiliki prestasi, dedikasi, disiplin, loyalitas, dan tidak tercela (PD2LT);
   c. Memiliki kapabilitas dan akseptabilitas;
   d. Tidak pernah terlibat G 30 S/PKI;
   e. Bersedia meluangkan waktu dan sanggup bekerjasama secara kolektif dalam Partai;
   f. Lulus Pendidikan dan Latihan Kader Partai Golkar.
2) Sudah memiliki keaktifan jadi pengurus paling tidak satu periode di tingkatan, maupun satu tingkat di atas, maupun satu tingkat yang di bawahnya.

Sedangkan untuk syarat kedua, apabila syarat pada poin 1 ada yang tidak terpenuhi atau telah menjabat 2 periode sebagai ketua, tetapi mendapat rekomendasi persetujuan maju sebagai bakal calon Ketua DPP Partai Golkar atau yang dikenal dengan istilah diskresi maka tetap dinyatakan sah sebagai bakal calon untuk maju sebagai calon ketua. Diskresi memiliki 2 (dua) tipe yaitu yang pertama diskresi untuk kader Partai Golkar dan yang kedua diskresi bukan kader Partai Golkar.

Berdasarkan hasil yang peneliti temukan kasus ini sebenarnya sudah melanggar kriteria ataupun syarat untuk menjadi pengurus Partai Golkar, yaitu terkait dengan syarat yang ada pada AD/ART Partai Golkar pasal 18. Kriteria ataupun syarat menjadi pengurus Partai Golkar pada pasal 18 ini dilanggar karena Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto memberikan surat kebijakan diskresi kepada Bupati Dairi Eddy Keleng Ate Berutu. Jikalau surat kebijakan diskresi dari Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto tidak ada, Eddy Keleng Ate Berutu selaku Bupati Dairi tidak akan bisa berbuat apa-apa. Tetapi karena kendali dari kebijakan diskresi dipegang penuh oleh Airlangga Hartarto selaku Ketua Umum DPP Partai Golkar maka tidak ada satupun yang dapat membantah hal itu.

4.3 Implementasi Teori Pilihan Rasional Dalam Penentuan Kebijakan Partai Golkar Terkait Pemilihan Ketua Golkar Kabupaten Dairi

Pemilihan Ketua Umum menjadi sebuah peristiwa penting dan sangat ditunggu dalam tubuh partai politik, karena hasil pemilihan inilah menjadi penentu siapa yang akan menjadi pemimpin arah

kemana partai akan dibawa. Pengangkatan Bupati Dairi yang bukan anggota Partai Golkar sebagai Ketua Fraksi Partai Golkar merupakan sesuatu hal yang baru khususnya sejak awal didirikannya Partai Golkar di Kabupaten Dairi. Sebab kasus ini pertama kalinya terjadi di Partai Golkar maupun di partai politik lainnya yang ada di Kabupaten Dairi.

Penelitian ini mengikuti cara berpikir dari James S. Coleman dalam melihat pilihan rasional yang dimiliki oleh seorang aktor. Implementasi Teori Pilihan Rasional dalam penentuan kebijakan Partai Golkar terkait pemilihan Ketua Partai Golkar Dairi mengkaji tindakan dari aktor Partai Golkar khususnya Ketua Umum DPP Partai Golkar. Ketua Umum DPP Partai Golkar yaitu Airlangga Hartarto menjadi tokoh yang sangat dihormati dan memiliki kekuasaan tertinggi yang tidak dimiliki semua orang. Salah satu implementasi kebijakan yang dikeluarkan oleh Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto adalah keputusannya untuk mengeluarkan kebijakan diskresi dalam pemilihan Ketua Partai Golkar Dairi. Salah satu implementasi Teori Pilihan Rasional dalam penentuan kebijakan Partai Golkar bukan hanya terkait pemilihan Ketua Partai Golkar Dairi saja, namun ada contoh lain kebijakan yang diambil oleh Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto yaitu pemberian diskresi kepada Ketua Partai Golkar Sumatera Utara Musa Rajekshah.

Sabam Sibarani dan Delphy Masdiana Ujung resmi menyatakan mengundurkan diri dari bursa pencalonan Ketua Golkar Kabupaten Dairi. Ada indikasi bahwa pengunduran diri ini bertujuan untuk memenangkan Eddy Keleng Ate Berutu sebagai Ketua Golkar Kabupaten Dairi selanjutnya. Sehingga kader lain merasa bahwa diskresi yang diberikan langsung oleh Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto bukan hanya diberikan namun akan dikawal hingga Eddy Keleng Ate Berutu menang, hal itu diperkuat karena telah terjadi pemaksaan percepatan waktu Musda oleh DPP Provinsi.

Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto sebagai aktor dalam Teori Pilihan Rasional memiliki pilihan dalam pemilihan Ketua Golkar Kabupaten Dairi sesuai dengan konsep yang ada. Dalam pemilihan calon Ketua Partai Golkar ada beberapa hal yang perlu menjadi pertimbangan yaitu : pertama memiliki eksabilitas (eksabilitas berarti tingkat keterpilihan yang disesuaikan dengan kriteria pilihan), kedua diprioritaskan yang sudah menjadi kader (kader berarti orang yang pernah ikut dalam pelatuhan dan dilantik menjadi kader), ketiga posisi atau kedudukannya di pemerintahan. Dalam aspek sumber daya, seperti yang ada dalam Teori Pilihan Rasional James S. Coleman dijelaskan bagaimana aktor atau sekelompok orang yang menguasai suatu hal dan dengan bebas menggunakan hal tersebut untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai hasil temuan ini mendapatkan baik Airlangga Hartarto sebagai aktor, maupun Eddy Keleng Ate Berutu sebagai sumber daya mempunyai kelebihan masing-masing yang sangat memadai untuk keduanya saling menguntungkan satu sama lain. Sumber

daya yang dimaksud ialah kandidat.

Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto memiliki pertimbangan kriteria, walaupun tidak diketahui apa yang menjadi pertimbangan itu. Aktor perlu pertimbangan pada setiap kandidat atau calon Ketua Partai Golkar yang satu dan lainnya. Oleh karena itu, dalam pemilihan calon Ketua Partai Golkar, Airlangga Hartarto selaku aktor perlu mempertimbangkan apa yang menjadi prioritas dalam pemilihan terhadap situasi dan kondisi ada di Partai Golkar. Pertimbangan yang dilakukan tersebut mampu memberikan gambaran terkait pemilihan yang dijalankan. Dalam konteks ini, Airlangga Hartarto selaku Ketua DPP Partai Golkar lebih memprioritaskan posisi ataupun kedudukannya di pemerintahan pada saat pemilihan calon Ketua Golkar Kabupaten Dairi.

Hasil yang peneliti temukan melalui penelitian ini memperlihatkan bahwa dukungan yang diberikan oleh Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto kepada Eddy Keleng Ate Berutu sudah pasti didasari atas berbagai tujuan yang ingin aktor ingin calon wujudkan dan capai. Tingkat kepercayaan yang diberikan Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto kepada Eddy Keleng Ate Berutu juga sangat besar, sehingga hal ini dirasa dapat menganalisis hal-hal yang menyangkut faktor penyebab dukungan dari Airlangga Hartarto pada pemilihan Ketua Golkar Kabupaten Dairi. Aktor rasional harus benar-benar memikirkan setiap tindakan yang dijalankan, Airlangga Hartarto sudah sangat memikirkan dukungannya kepada Bupati Dairi Eddy Keleng Ate Berutu, sebab jika Partai Golkar masih menjadi penguasa di Kabupaten Dairi maka akan banyak keuntungan yang didapatkan apalagi dalam event-event Pemilihan Umum. Dalam aspek sumber daya pada penelitian ini, terdapat juga sumber daya non material dari Eddy Keleng Ate Berutu. Eddy Keleng Ate Berutu memiliki citra dan nama baik di masyarakat Kabupaten Dairi semenjak terpilihnya menjadi Bupati Dairi pada 23 April 2019. Walaupun Eddy Keleng Ate Berutu baru menjadi anggota Partai Golkar, tetapi Airlangga Hartarto selaku aktor rasional dalam penelitian ini meyakini bahwa beliau mampu memimpin dan memajukan Partai Golkar.

Menurut hasil temuan peneliti, terdapat dua tujuan ataupun alasan politis yang membuat Airlangga Hartarto mengeluarkan surat kebijakan diskresi untuk mendukung penuh Eddy Keleng Ate Berutu menang sebagai Ketua Golkar Kabupaten Dairi. Tujuan atau alasan yang pertama, dengan melihat sejarah panjang dari Partai Golkar yang sukses di Kabupaten Dairi. Kenyataan mengungkap bahwa sejak berdirinya Kabupaten Dairi, bupati yang terpilih selalu berasal dari Partai Golkar. Alasan atau tujuan yang kedua adalah pragmatisme. Eddy Keleng Ate Berutu digadang-gadang akan Kembali maju sebagai calon bupati tahun 2024 mendatang. Secara realistis Airlangga Hartarto akan selalu berhitung menang atau kalah dalam pemilihan kepala daerah. Airlangga Hartarto juga memiliki kepentingan untuk memenangkan Partai

Golkar disetiap agenda Pemilihan Umum Daerah, oleh karena itu Airlangga Hartarto akan menjadi aspek elektabilitas kandidat menjadi aspek terpenting dalam pengambilan keputusan partai.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil temuan dan analisa penelitian yang dilakukan, maka penulis memaparkan kesimpulan bahwa kebijakan diskresi yang dikeluarkan oleh Airlangga Hartarto menjadi modal utama Eddy Keleng Ate Berutu untuk maju pemilihan Ketua Golkar Kabupaten Dairi. Pilihan rasional dari James Coleman berkaitan erat dengan Airlangga Hartarto sendiri sebagai aktor rasional dan kepemilikan sumber daya yaitu Eddy Keleng Ate Berutu. Power Holder (Pemegang Kekuasaan) dalam Partai Golkar adalah Airlangga Hartarto, maka jika beliau mengeluarkan surat diskresi orang tersebut dipercaya untuk membesarkan Partai Golkar atau dalam arti lain orang tersebut memiliki nilai plus tersendiri. Dalam hal ini juga terdapat konsensi vertikal lewat Airlangga Hartarto dan konsensi horizontal posisi Bupati Dairi.

Konsensi horizontal memberi ruang kepada orang yang bukan dari Partai Golkar, dan hal ini baru pertama kalinya terjadi di Partai Golkar seluruh Indonesia. Pilihan yang diberikan melekat kepada power yang ada dinegara. Airlangga Hartarto yang memberi diskresi punya sumber yang berasal dari negara. Semuanya adalah cara aktor politik mengalokasikan sumber daya seperti yang dikatakan James Coleman. Dua Calon Ketua yang sebelumnya mendaftarkan diri mau tersingkir dan mundur karena Airlangga Hartarto menjanjikan Sabam Sibarani menjadi Sekretaris Golkar Dairi dan Delphy Masdiana Ujung menjadi Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Sumatera Utara IX DPD Partai Golkar Sumatera Utara.

6. DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Albi Anggito, J. S. (2018). Metodologi Penelitian Kualitatif. Jawa Barat: Cv Jejak.

Anggito. (2018). Metodologi Penelitian Kualitatif. Jawa Barat: Cv Jejak.

Budiarjo, M. (2007). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT.Gramedia Utama.

Coleman, J. S. (1990). *Foundations of Social Theory*. Cambridge: Belknap Press of Harvard University Press

Creswell, J. W. (2017). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches Fifth Edition*. California, London, New Delhi: Sage Publication

Haris, S. (2014). *Partai,Pemilu dan Parlemen Di Era Reformasi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Helaluddin, & H. Wijaya. (2019). Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori & Praktik.

Ismail Suardi Wekke, D. (2019). Metode Penelitian Sosial. Yogyakarta: Cv. Adi Karya Mandiri.

Kompas, L. (2004). *Partai-Partai Politik di Indonesia*. Jakarta: Buku kompas.

Ma'arif, A. S. (1993). *Perjalanan Partai*

Politik di Indonesia: sebuah potret pasang surut. Jakarta: Rajawali Press.

Mamik. (2015). Metodologi Kualitatif. Taman Sidoarjo: Zifatama.

Miles, M. B., Hubermas, A, M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcesbook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publication

Moleong, L. J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya

Muhammad Labolo, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*

(Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2007), hal 35.

Pildes H. Richard, *The Constitutionalization of Democratic Politics*, (Harvard Law Review, Vol. 118:1,2004), hal 18-19.

Prafitasari, A. (2016). Jurnal translitera. 31–48.

Rukin. (2019). Metodologi Penelitian Kualitatif. Sulawesi Selatan: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia.

Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Suyanto, dkk. (2018). Memahami Teori Sosial. Surabaya: Universitas Airlangga. Syahri, M. A. (2018). Peran dan Wewenang Majelis Tuha Peut Dalam Membuat

Kebijakan Partai Aceh (Studi Kasus Dewan Pimpinan Partai Aceh). Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah, 3(1–22), 1–22.

Umrati, & H. Wijaya. (2020). Analisis Data Kualitatif Teori Konsep Dalam Penelitian. Makasssar.

Usman, N. (2002). Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum. 70.

Warjio, (2022), *Mengukur Kualitas Demokrasi : Konsep, Lembaga, dan Metodologi.* Jakarta: Kencana.

Yulikhsan, Eri. (2016). Keputusan Diskresi dalam Dinamika Pemerintahan. Yogyakarta

Jurnal/Artikel Ilmiah :

Efriza. (2019). Eksistensi Partai Politik Dalam Persepsi Publik. *Jurnal Politica,10*(1),6.

Harjanto, Niko. (2019). Politik Kekerabatan dan Institusionalisasi Partai Politik di Indonesia. *Analisis CSIS: Politik dan Kekerabatan Di Indonesia,* 143.

Kurniawan. (2010). Proses Pemilihan Ketua Umum Partai Politik Yang Demokratis", Aceh 2010, hal 9.9.

Rijali, A. 2018. Analisis Data Kualitatif. Jurnal Alhadharah. Vol 17 (33).

Banjarmasin: UIN Antasari Banjarmasin.

Ristiyawati, Aprista. (2019). Penguatan Partai Politik sebagai Salah Satu Bentuk Pengadministasian dan Pelembagaan Demokrasi. *Administrative Law and Governance Jurnal,* 2(3), 3.

Website :

Airlangga Hartarto Dukung Eddy Keleng Ate Daftar Calon Ketua Golkar Dairi Diakses pada tanggal 15 November 2021 pada laman https://www.jpnn.com/news/airlangga-hartarto-dukung-eddy-keleng-daftar-calon-ketua-golkar-dairi?page=2

Astronomis Kabupaten Dairi, (n.d). Diakses pada tanggal 3 Juli 2022 pada laman https://portal.dairikab.go.id/astronomis/

Bupati Dairi Klaim Dapat Dukungan Airlangga Maju Ketua DPD II Golkar Dairi.(n.d). Diakses pada tanggal 15 Juni 2022 pada laman https://www.merdeka.com/politik/bupati-eddy-berutu-klaim-dapat-dukungan-airlangga-maju-ketua-dpd-golkar-dairi.html.

Bupati Eddy Terpilih Secara Aklamasi Sebagai Ketua DPD II Golkar Dairi, (n.d), Diakses pada tanggal 15 Juni 2022 pada laman https://www.merdeka.com/politik/bupati-eddy-terpilih-secara-aklamasi-sebagai-ketua-dpd-ii-golkar-dairi.html.

Bupati VS Ketua DPRD Dairi Berebut Posisi Ketua Golkar, (n.d), Diakses pada tanggal 1 Februari 2022 pada laman https://www.tagar.id/sah-bupati-vs-ketua-dprd-berebut-ketua-golkar-dairi.

Bustari, Zerina Definta. 2003. *Sejarah Singkat Partai Politik*. Diakses pada tanggal 10 November 2021 pada laman https://www.kompasiana.com/zerinadefinta3140/61a5840706310e78c9585 733/sejarah-singkat-partai-politik

Diskresi Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik, (n.d). Diakses pada tanggal 17 Februari 2022 pada laman https://ombudsman.go.id/artikel-diskresi-dalam-penyelenggaraan-pelayanan-publik.

Eddy Keleng Ate Berutu. (n.d) Diakses pada tanggal 10 November 2021

pada laman https://id.wikipedia.org/wiki/Eddy_Keleng_Ate_Berutu.

Ganesha, P.S. (n.d). *Teknik Analisis Kualitatif*, Diakses pada tanggal 3 Februari 22022 pada laman http://undiksha.ac.id/teknis-analisis-data-kualitatif/.

Geografi Kabupaten Dairi, (n.d), Diakses pada tanggal 5 Juli 2022 pada laman https://portal.dairikab.go.id/geografi/ .

Heryana, A. 2018. Informan Dan Pemilihan Informan Dalam Penelitian Kualitatif. Diakses pada tanggal 15 Januari 2022 pada laman https://www.researchgate.net/publication/329351816_Informan_dan_Pemilihan_Informan_dalam_Penelitian_Kualitatif

Jppn. 2020. Airlangga Hartarto Dukung Eddy Keleng Ate Daftar Calon Ketua Golkar Dairi. Diakses pada 1 Februari 2022 pada laman https://www.jpnn.com/news/airlangga-hartarto-dukung-eddy-keleng-daftar-calon-ketua-golkar-dairi?page=2.

Jumlah Penduduk Kabupaten Dairi, (2020,Januari,2020), Diakses pada tanggal 7 Juli 2022 pada laman https://dairikab.bps.go.id/indicator/12/29/1/jumlah-penduduk-kabupaten-dairi-.html.

Kedudukan Diskresi Pejabatan dan Kemenangan Pada Umumnya, Diakses pada tanggal 7 Juli 2022 pada laman https://www.djpr.kemenkeu.go.id/uploads/files/Kajian_Artikel_DJPPR/Diskresi%20Pejabat%20Pemerintahan-Akhmad%20Mahrus.pdf.

Kim, L. (n.d) Asal Usul Partai Politik: Sejarah Perkembangan Fraksi Inggris Hingga Keseluruhan Dunia, Diakses pada tanggal 9 November 2021 pada laman https://medium.com/hipotesa-indonesia/asal-usul-partai-politik-9db2ff117718.

Kondisi Geografis Kabupaten Dairi, (n.d). Diakses pada tanggal 5 Juli 2022 pada laman https:///djpb.kemenkeu.go.id/kppn/sidikalang/id/profil/kondisi-geografis.html.

Kontestan Mundur Eddy Jadi Ketua Partai, (n.d) Diakses pada tanggal 8 Juli 2022 pada laman https://www.tagar.id.kontestan-mundur-eddy-keleng-jadi-ketua-golkar-dairi.

Lubabah, Raynaldo Ghiffari. 2020 Bupati Dairi Klaim Dapat Dukungan Airlangga Maju Ketua DPD II Golkar Dairi. (n.d). Diakses pada tanggal 5 Februari 2022 pada laman https://www.merdeka.com/politik/bupati-eddy- berutu-klaim-dapat-dukungan-airlangga-maju-ketua-dpd-golkar-dairi.html

Mengenal Eddy Berutu, (n.d), Diakses pada tanggal 4 Juli 2022 pada laman

https://sumut.idntimes.com/news/sumut/arifin-alamudi/mengenal-eddy-berutu-komisaris-perusahaan-asuransi-jadi-bupati-dairi.

Panggabean, Robert. 2020. *Bupati VS Ketua DPRD Dairi Berebut Posisi Ketua Golkar*. (n.d). Diakses pada tanggal 7 Februari 2022 pada laman https://www.tagar.id./sah-bupati-vs-ketua-dprd-berebut-ketua-golkar-dairi.

Partai Golkar. (n.d) Diakses pada tanggal 8 Juli 2022 pada laman https://www.partaigolkar.com/wp-content/uploads/2020/08/ANGGARAN-DASAR-DAN-ANGGARAN-rumah-Tangga-Partai-Golkar-2019.pdf.

Partai Golkar, Visi dan Misi Partai Golkar, (n.d) Diakses pada tanggal 8 Juli 2022 pada laman https://www.partaigolkar.com/visis-dan-misi/.

Prasetya, Eko. 2020. *Bupati Eddy Terpilih Secara Aklamasi Sebagai Ketua DPD II Golkar Dairi*. (n.d). Diakses pada tanggal 4 Februari 2022 pada laman https://www.merdeka.com/politik/bupati-eddy-berutu-terpilih-secara-aklamasi-sebagai-ketua-dpd-ii-golkar-dairi.html

Sejarah Singkat Pembentukan Kabupaten Dairi, (n.d). Diakses pada tanggal 3 Juli 2022 pada laman https://portal.dairikab.go.id/sejarah/

Septiani, Maya. 2020. *Diskresi Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik*. (n.d) Diakses pada tanggal 13 November 2021 pada laman https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel-diskresi-dalam-penyelenggaraan- pelayanan-publik

Struktur Pemerintahan Kabupaten Dairi, (n.d). Diakses pada tanggal 4 Juli 2022 pada laman https://portal.dairikab.go.id/struktur/

Undang-Undang :

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, diakses pada tanggal 9 November 2021 pada laman https://perludem.org/2021/07/08/undang-undang-tentang-partai-politik/,

Surat Keterangan :

SK DPD Partai Golkar Hasil Revitalisasi, Nomor : Skep-58/ GK-SU/XI/2021 Tentang PENGESAHAN SUSUNAN KOMPOSISI DAN PERSONALIA DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI GOLONGAN KARYA KABUPATEN DAIRI MASA BAKTI 2020-2025 (HASIL REVITALISASI) hal 1-5.